

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) dalam advokasi pelanggaran hak asasi manusia di konflik Israel-Palestina sejak Oktober 2023 sampai Oktober 2024. Konflik yang memanas sejak Oktober 2023 ini telah memicu krisis kemanusiaan luas dan pelanggaran HAM, menarik perhatian global termasuk OHCHR. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi peran OHCHR dalam menangani pelanggaran HAM di konflik tersebut hingga Oktober 2024. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan analitis, penelitian ini menganalisis dokumen dan laporan resmi dari OHCHR dan PBB, jurnal ilmiah, serta laporan dari organisasi non-pemerintah. Teknik pengumpulan data juga didukung oleh wawancara mendalam dengan akademisi, peneliti, atau pakar yang berkompeten di bidang hak asasi manusia dan hubungan internasional, khususnya konflik Israel dan Palestina, termasuk Bapak Smith Alhadar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa OHCHR berperan krusial dalam memantau, melaporkan, dan mengadvokasi pelanggaran HAM, termasuk penyorotan penggunaan kekuatan tidak proporsional, penangkapan massal, kekerasan pemukim, serta mendorong investigasi independen melalui Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Namun, efektivitas peran OHCHR terhambat oleh keterbatasan akses ke wilayah konflik, tekanan politik internasional, dan penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB yang seringkali menghalangi resolusi HAM. Meskipun demikian, OHCHR terus berupaya mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM internasional berdasarkan Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan (CIL) dan hukum HAM internasional. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya peran OHCHR dalam perlindungan HAM di zona konflik, sekaligus menyoroti kompleksitas dan tantangan yang dihadapi lembaga internasional dalam menegakkan keadilan di tengah situasi yang sangat politis.

Kata Kunci: Konflik Israel-Palestina, Pelanggaran HAM, OHCHR, Hukum Humaniter, Peran Organisasi Internasional

ABSTRACT

This study analyze the role of the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) in advocating against human rights violations in the Israel-Palestine conflict from October 2023 to October 2024. The escalating conflict since October 2023 has triggered a widespread humanitarian crisis and human rights (HR) violations, drawing global attention, including from OHCHR. This study aims to evaluate OHCHR's role in addressing human rights violations in the conflict until October 2024. Employing a qualitative approach with descriptive and analytical methods, this research analyzes documents and official reports from OHCHR and the UN, academic journals, and reports from non-governmental organizations. Data collection is also supported by in-depth interviews with academics, researchers, or experts competent in human rights and international relations, particularly the Israel-Palestine conflict, including Mr. Smith Alhadar.

The findings indicate that OHCHR plays a crucial role in monitoring, reporting, and advocating against human rights violations, including highlighting the disproportionate use of force, mass arrests, settler violence, and promoting independent investigations through the International Criminal Court (ICC). However, the effectiveness of OHCHR's role is hampered by limited access to conflict areas, international political pressure, and the use of veto power in the UN Security Council, which often obstructs human rights resolutions. Nevertheless, OHCHR continues to strive to implement international human rights principles based on Customary International Humanitarian Law (CIL) and international human rights law. The study concludes by affirming the importance of OHCHR's role in human rights protection in conflict zones, while also underscoring the complexities and challenges faced by international bodies in upholding justice amid highly politicized situations.

Key Words: *Israel-Palestine Conflict, Human Rights Violation, OHCHR, International Organization, International Humanitarian Law*